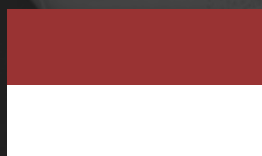




**WORLD WIDE WEB
FOUNDATION**

RAPOR HAK-HAK DARING

PEREM- PUAN



INDONESIA

**Mengukur kemajuan,
Mendorong langkah nyata**

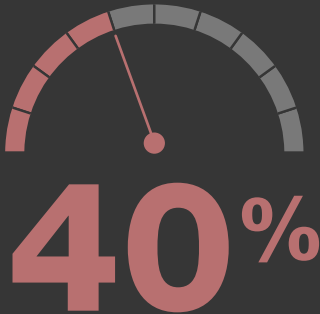


WORLD WIDE WEB
FOUNDATION

INDONESIA



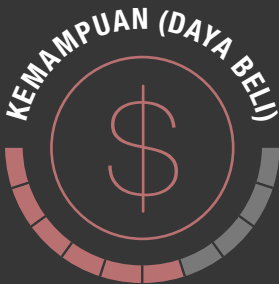
NILAI KESELURUHAN:



SKOR: **3**

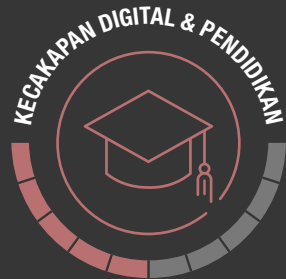
Hanya 20% perempuan memiliki akses Internet.* Meski angka ini meningkat hingga 31% di antara perempuan miskin di Jakarta, hanya segelintir yang menggunakan Internet sebagai media berekspresi (5%) atau mencari informasi penting mengenai hak-hak mereka (26%).

* Berdasarkan data terbaru dari ITU, yang digunakan dalam rapor untuk seluruh negara, guna menjamin keberbandingan. Namun, data ini lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Universitas Indonesia pada tahun 2015.



SKOR: **6**

Sekitar 1,4% dari rata-rata pemasukan bulanan digunakan untuk memperoleh 1 GB data, Indonesia telah mencapai target kemampuan A4AI "1 untuk 2". Selain itu, akses masyarakat melalui telecenter dan wifi umum secara perlahan meningkat jumlahnya. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terkait infrastruktur, akses dan daya beli TIK.



SKOR: **5**

52% dari sekolah menengah di Indonesia telah terhubung dengan Internet. Beberapa Pusat Kegiatan Belajar-Mengajar berbasis komunitas (pusat pendidikan dan keterampilan masyarakat /pemuda) juga menyediakan akses komputer dan Internet. Kendati demikian, tenaga pendidik di bidang TIK masih sangat terbatas.



SKOR: **3**

Berbagai organisasi menyediakan pendidikan bagi masyarakat, terutama kaum muda, mengenai topik kesehatan dengan menyediakan informasi lewat telepon, SMS, dan daring. Namun, manfaatnya belum sepenuhnya menjangkau perempuan yang tinggal di pedesaan dan/atau di kawasan miskin. Kurang dari 1% perempuan memiliki akses layanan perbankan bergerak (mobile banking services).



SKOR: **3**

Pemerintah secara aktif mendukung inisiatif peningkatan kesadaran (awareness) mengenai kebijakan dan keamanan. Akan tetapi, pelatihan dan sumberdaya penegak hukum yang masih kurang untuk penanggulangan kekerasan berbasis gender lewat TIK. Serta pemblokiran dan penyaringan konten yang dicurigai berbahaya tanpa melalui proses hukum, telah menimbulkan keprihatinan bersama. RUU Data Pribadi kini sedang dalam proses pertimbangan.

MENGURANGI KESENJANGAN GENDER: 5 POKOK RENCANA AKSI

- 1 MENGINTEGRASIKAN SEMUA TARGET GENDER DALAM RENCANA TIK NASIONAL.** Tetapkan target yang kongkrit untuk kesetaraan gender dalam hal akses TIK, dengan anggaran yang memadai untuk program-program tersebut. Target-target ini harus dimonitor melalui pengumpulan data berkala: Indonesia sudah termasuk dalam daftar kecil negara-negara pengumpul data dasar penggunaan Internet berbasis gender, oleh sebab itu upaya ini perlu dikembangkan untuk indikator kunci TIK lainnya.
- 2 CIPTAKAN AKSES PUBLIK DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DIGITAL BAGI MASYARAKAT.** Buat dan implementasikan kebijakan khusus untuk meningkatkan ketersediaan akses Internet murah atau gratis bagi masyarakat di tempat-tempat umum. Pastikan anggaran dan sumber daya yang memadai sehingga inisiatif tersebut terjamin ketersinambungannya. Ketersediaan akses publik juga perlu diiringi dengan adanya pendidikan masyarakat mengenai privasi dan keamanan daring.
- 3 DUKUNG PEREMPUAN UNTUK MENGAKSES, MENGGUNAKAN, DAN MENCIPTAKAN TEKNOLOGI INTERNET.** Kembangkan strategi yang telah berjalan untuk mendorong peningkatan akses, pelatihan, serta pemanfaatan Internet oleh perempuan. Perempuan seharusnya dapat didorong untuk berkarir di ranah teknologi, dengan target konkret untuk kesetaraan gender di area ini.
- 4 FOKUS PADA KONTEN DAN LAYANAN YANG RELEVAN BAGI PEREMPUAN.** Informasi lengkap mengenai hak-hak hukum perempuan, hak-hak kesehatan reproduksi dan kesehatan seks, serta layanan bagi korban kekerasan berbasis gender, seharusnya tersedia dalam sistem TIK berbasis web.
- 5 HENTIKAN KEKERASAN ONLINE BERBASIS GENDER.** Buat dan laksanakan kebijakan berimbang yang menjabarkan dan menghukum tegas pelecehan berbasis TIK dan daring, dengan terus menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi, terutama bagi perempuan, kelompok minoritas dan marjinal. Pelatihan bagi para penegak hukum harus diutamakan, sedangkan inisiatif pendidikan bagi kaum muda harus terus ditingkatkan terkait kesadaran diri (self-awareness), privasi, dan keamanan dunia daring.

ULASAN PROYEK

5 GENDER EQUALITY



Baru-baru ini Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengedepankan kesetaraan gender sebagai sebuah hal penting dalam Rencana Pembangunan Berkesinambungan (SDGs), agenda

pembangunan global hingga 2030. Mengapa? Karena TIK memiliki kemampuan yang luar biasa; mampu memperbaiki layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua, akses keuangan yang inklusif, pemerintahan yang lebih akuntabel, dan sebagainya. Semua negara yang mengadopsi SDGs, telah berkomitmen untuk memprioritaskan akses Internet secara universal, dan menggunakan TIK untuk memberdayakan perempuan.

Namun banyak kerja keras yang harus dilakukan apabila kita akan mewujudkan visi tersebut. Kesenjangan gender yang besar dalam hal akses internet, ketrampilan digital dan keberadaan hak-hak daring (online) – [Riset](#) kami tentang Hak-Hak Daring Perempuan menunjukkan bahwa di banyak kelompok, kecenderungan perempuan menggunakan

fasilitas daring 50% lebih kecil dibandingkan laki-laki, dan 30-50% perempuan cenderung jarang menggunakan Internet untuk alasan ekonomi maupun pemberdayaan politik. Perempuan mengalami berbagai kendala, termasuk diantaranya biaya yang mahal, kurangnya pengetahuan dan kemampuan, dan jarangya konten yang relevan serta bermanfaat, selain itu ada juga hambatan sosial dan legal terkait kebebasan berbicara dalam konteks publik maupun privat di dalam jaringan (online).

The Web Foundation beserta para partnernya telah merangkum sekumpulan audit berbasis gender untuk membantu berbagai negara menilai apa saja yang mereka perlukan untuk menjembatani kesenjangan gender berbasis digital. ICT Watch telah memulai inisiatif ini dengan cara memberi masukan kepada para pemegang kepentingan (stakeholder) nasional, dengan mengidentifikasi langkah-langkah nyata yang dapat ditempuh pemerintah dalam satu tahun ke depan, untuk mengatasi tantangan dan kesenjangan yang telah teridentifikasi. Kami berharap bahwa rapor dan rencana kerja ini dapat mendorong lebih banyak diskusi dan juga mendorong adanya perubahan kebijakan.

CATATAN MENGENAI METODE KAMI:

Penilaian yang kami gunakan berdasarkan pada 14 indikator sederhana dengan memaparkan bukti empiris, dan pemeringkatan dilakukan pada kuartal kedua tahun 2016. Silakan merujuk pada ringkasan deskriptif mengenai indikator dan sumber yang kami kutip. Metodologi lengkap tersedia di situs web kami.



**WORLD WIDE WEB
FOUNDATION**

Hasil kerjasama dengan:



Didukung oleh:

